

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai manajemen pelayanan kebersihan pasca kenaikan tarif retribusi kebersihan/persampahan di Kecamatan Tanjung Karang Pusat tahun 2013, manajemen yang diterapkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah menggunakan model manajemen tradisional, yang akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Dari fungsi perencanaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan fungsi perencanaan berdasarkan pada Renstra dengan meningkatkan armada pengangkutan sampah untuk meningkatkan pelayanan kebersihan yang optimal. Namun dalam hal pengelolaan sampah di TPA Bakung belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dari perencanaan yang sudah tertera dalam Renstra. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan yaitu sistem pengelolaan sampah masih menggunakan metode lama yakni *open dumping*.
2. Pengorganisasian di Dinas Kebersihan dan Pertamanan sudah berjalan hal ini ditandai dengan pembentukan struktur organisasi model lini seperti adanya pembagian tugas berdasarkan fungsi dan jabatannya. Semua tugas yang dilaksanakan mengacu pada Perwali Nomor 14 Tahun 2008 tentang tugas, fungsi

dan tata kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Adanya pengembangan organisasi dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai upaya untuk mempermudah dalam mengendalikan sampah di tiap kecamatan. Namun masih ada permasalahan yaitu penempatan tugas tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan pegawai, sehingga menyebabkan jalannya manajemen dalam instansi tersebut menjadi tersendat karena bidang yang dijabatnya tidak sesuai dengan kemampuan dan kompeten yang dimiliki pegawainya.

3. Pengarahan yang dilakukan berdasarkan SOP dan dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat atas hingga ke tingkat bawah. Bentuk arahan dilakukan oleh pimpinan seperti pemberian instruksi, perintah maupun tugas kepada setiap pegawai. Namun masih terbentur kendala yakni setiap pegawai berbeda-beda kemampuannya dalam menyerap instruksi dari atasannya. Hal ini disebabkan karena latar belakang pendidikan setiap individu berbeda.
4. Pengoordinasian yang dilakukan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan dilakukan secara internal dan eksternal. Namun belum terjalannya kesatuan arahan dalam mengatasi persoalan kebersihan yang ada dilingkungan, hal ini ditandai dengan saling lempar tanggungjawab antar instansi apabila terdapat masalah di lapangan.
5. Fungsi terakhir yaitu pengendalian, pengendalian yang dilakukan masih belum efektif, hal ini ditandai dengan masih rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas terhadap satgas yang bekerja di lapangan sehingga masih banyak sampah yang tidak terangkut.
6. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan yaitu berupa kendala internal dan eksternal. Kendala internal yaitu masih sulitnya

membina dan mengarahkan satgas di lapangan karena latar belakang pendidikan yang rendah sehingga sulit menyerap perintah dari atasan. Selain itu dari aspek pengelolaan sampah, belum menerapkan pengelolaan sampah yang berlandaskan pada UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah. Kendala eksternal yaitu masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.

B. Saran

Adapun hal-hal yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan dalam mengelola manajemen pelayanan kebersihan khususnya di wilayah Tanjung Karang Pusat antara lain :

1. Memperbaiki sistem manajemen yang ada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan yaitu dengan menerapkan sistem *New Public Management* dimana Dinas Kebersihan dan Pertamanan dapat melibatkan investor asing atau pihak swasta dalam mengelola sampah serta dengan pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga persoalan sampah yang kian menumpuk dapat teratasi.
2. Sistem rekrutmen pegawai harus lebih terintegrasi. Rekrutmen pegawai harus didasarkan dengan riwayat pendidikan terakhir dan kemampuan berorganisasi. Harus ada penambahan kualifikasi yang sesuai dengan jabatan, tugas dan fungsi dari masing-masing pegawai, seperti pendidikan terakhir minimal Strata 1 yang sesuai dengan yang dibutuhkan.
3. Mengimplementasikan sistem pengelolaan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah khususnya dalam

meningkatkan inovasi dalam pengelolaan sampah, karena saat ini pengelolaan sampah di TPA Bakung hanya sebatas *open dumping* dan *sanitary landfill* atau penimbunan saja.

4. Perlu adanya kerjasama serta koordinasi yang terjalin baik antar instansi yang terkait dalam pelayanan kebersihan. Dalam mewujudkannya dapat diadakan rapat rutin yang membahas program-program apa saja yang hendak dilaksanakan di masa yang akan mendatang serta diadakannya evaluasi untuk menilai sejauhmana kinerja yang sudah dilakukan dan melakukan perbaikan apabila terdapat penyimpangan.
5. Menjalin komunikasi yang efektif dengan satgas yang bekerja dilapangan dengan melakukan pendekatan berdasarkan tipe dan karakteristiknya agar mereka memahami apa yang diperintahkan.
6. Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadarannya dalam menjaga kebersihan serta mengadakan pelatihan dalam pengelolaan sampah sehingga sampah tersebut dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai ekonomis. Untuk mewujudkannya dapat dibentuk forum yang menampung aspirasi dan ide masyarakat dalam mengembangkan gagasannya mengolah sampah, sehingga tingkat volume sampah dapat diminimalisir.
7. Pengadaan jumlah sarana dan prasarana lebih ditingkatkan lagi untuk mengganti beberapa prasarana kebersihan yang sudah rusak dengan yang baru.